KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2006, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____ 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a, 2009, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung.

Budiarjo, Miriam, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Curriden, Mark dan Leroy Phillips Jr., 1999, *Contempt of Court*, Faber and Faber Inc., New York.

Fuady, Munir, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 1989, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono., S.H., M.C.L Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahfud MD, 2005, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi:Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Jakarta, Konstitusi Press.

Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum* , Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum,* Liberty, Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi Norma, Praktik,Gagasan, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.

Oswald, James Francis, 1985, *Contempt of Court, Commital, and Attachment, and Arrest Upon Civil Process in the Supreme Court of Judicature (With the Practice and Forms)*, William Clowes and Sons Limited, London.

Palguna, I Dewa Gede, 2008, *Mahakamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State,* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

_____, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pangaribuan, Luhut M. P., 2002, *Advokat dan Contempt of Court (Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi)*, Djambatan, Jakarta.

R., Dri Utari Christina dan Ismail Hasani (Ed), 2013, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI: Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.

Rasaid, M. Nur, 2003, *Hukum Acara Perdata,* Cetakan III, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Sarip dan Achmad Rizky Pratama, 2008, *Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.

Siahaan, Maruarar, 2006, *Hukum Acara Mahkmah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* , UI Press, Jakarta.

_____ dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Soeprapto, Maria Farida Indriati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Jilid I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

_____, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Jilid II: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Thaib, Dahlan, *et al*., 2013, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wheare, K.C., 2005, Konstitusi-Konstitusi Modern, Eureka, Surabaya.

Jurnal

Laksono, Fajar, *et.al*., "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012", *Jurnal Konstitusi*, Volume 4, Desember, 2013.

Runtuwene, Theodoron B.V., "Kajian Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Ditinjau dari Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Peninjauan Kembali", *Jurnal Lex Administratum*, Volume III, No. 4, Juni 2015.

Siahaan, Maruarar, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Volume 16, No. 3, Juli 2009.

Wahyono, Padmo, "*Contempt of Court* dalam Proses Peradilan di Indonesia", *Jurnal Era Hukum*, Nomor 1, Tahun I, November, 1987.

Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002, "*Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*", Hasil Penelitian, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Rahman, Faiz, 2016, *Implikasi Putusan Bersyarat dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Sifat Final dan Mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Setara Institute, 2016, *Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2015-2016 (Mendorong Kepatuhan Lembaga Negara pada Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Hasil Penelitian, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.

Sholikin, M., Nur, *et.al*., 2007, *Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi*, Hasil Penelitian, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Syukri Asy'ari *et al.*, 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Studi Putusan Tahun 2003-*

KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2012, Hasil Penelitian, Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Wibowo, Yuniar Andi, 2016, *Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Makalah/ Pidato

Assiddiqie, Jimly, "Upaya Perancangan Undang-Undang tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (*Contempt of Court*)", *Makalah*, Seminar Nasional Urgensi dan Prospek Pengaturan *Ius Constituendum* UU tentang *Contempt of Court* Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan, Jakarta, 29 April 2015.

Manan, Bagir, "Tindak Pidana *Contempt of Court* (Suatu Perkenalan)", *Makalah*, Tanpa Tahun.

Mulyadi, Lilik, "Urgensi Prospek Pengaturan (*Ius Constituendum*) UU tentang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan", *Bahan Presentasi Focus Group Discussion* (*FGD*), Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 16 April 2015.

Wagian, Wahyu, 2005, *Position Paper:Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, Jakarta.

Internet

Cambridge English – Indonesian Dictionary, *http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/court_1*, diakses pada 6 Februari 2017.

Institute for Crminal Justice Reform, "MA Anggap PERMA Praperadilan Belum Perlu", *http://icjr.or.id/ma-anggap-perma-praperadilan-belum-perlu/*, diakses tanggal 26 Oktober 2017.

Legal Dictionary, *Contempt of Court*, legal definitions. *http://www.duhaime.org/LegalDictionary/c/ContemptofCourt.aspx*, diakses 23 Januari 2017.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", *http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU*, diakses 1 Agustus 2016.

KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mahkamah Konstitusi, "Gubernur Papua Barat dan Bupati Maybrat Diminta Patuhi Putusan MK",*http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12128#.WffRjWiCy00*, diakses pada 6 Agustus 2017.

Perserikatan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), "RUU SDA Masuk Prolegnas Perubahan 2017", *http://perpamsi.or.id/berita/view/2017/08/18/414/ruu-sda-masuk-prolegnas-perubahan-20171*, diakses tanggal 26 Oktober 2017.

Radar Sorong, "Pemindahan Ibukota dengan Peraturan Pemerintah. Kabag Otda: Selama PP Belum Ada Ibukota Maybrat Tetap di Kumurkek", *http://www.radarsorong.com/read/2017/07/05/51753/Pemindahan-Ibukota-Dengan-Peraturan-Pemerintah,* diakses tanggal 10 Agustus 2016.

Tribun Jabar, "ASN yang Daftar Pilwakot Harus Mundur Sejak Ditetapkan sebagai Paslon Peserta Pemilihan", *http://jabar.tribunnews.com/2017/08/27/asn-yang-daftar-pilwalkot-harus-mundur-sejak-ditetapkan-sebagai-paslon-peserta-pemilihan,* diakses tanggal 20 September 2017.

Bahan Perkuliahan

Sumardjono, Maria SW, "Metodologi Penelitian Ilmu Hukum", *Bahan Kuliah,* Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Saimah, Eni dan T. Effendi, "*Contempt of Court*", *Bahan Ajar,* 2014.

Kamus

Campbell, Henry Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, MINN West Publishing Co., St. Paul.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, 2003, *Kamus Inggris-Indonesia (an English-Indonesian Dictionary),* Cornell University Press-Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupat, dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1098).

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Menteri Pertanian Noomor 67/ Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tenang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Januari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 8 Januari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Januari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Januari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Februari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 26 Februari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Maret 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Maret 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Maret 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Maret 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Maret 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 6 Mei 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Maret 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Mei 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Mei 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juli 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap

KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Juli 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 Agustus 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 10 September 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 September 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 September 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Oktober 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Februari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12 Maret 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 6 Maret 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2013 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 26 Maret 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 April 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 Juli 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 April 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 April 2014.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Juli 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 September 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 September 2014.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 Oktober 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Oktober 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 Oktober 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 5 November 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 November 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Desember 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Desember 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Januari 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Februari 2015.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 26 Februari 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 Maret 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 April 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 26 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juni 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 8 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 Agustus 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 Oktober 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 November 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 November 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tetang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 10 Desember 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 10 Desember 2015.

Kebijakan Pemerintah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK PATUH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAI SALAH SATU CONTEMPT OF COURT**
WAFDAH ZIKRA Y, Aminoto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor: 017/MPK/SE/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Kebijakan Transisi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/2304/SJ tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-X/2013 tanggal 6 Mei 2013.

Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomr 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013.

Surat Edaran Nomor: 554/KPU/VIII/2013 tentang Penjelasan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2012 tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas 1 Tahun secara Kolektif.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/Men/I/2015